

ABSTRAK

Tingginya angka pengangguran masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Berdasarkan data jumlah pengangguran ini, tentunya menjadi beban pemerintah yang harus dicarikan solusinya dengan berbagai terobosan dalam menciptakan kesempatan kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja adalah melakukan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja guna mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri antara lain melalui program pemagangan ke Jepang. Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui peran Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan permasalahan pemagangan. Kedua, mengetahui pelaksanaan rekrutmen program pemagangan ke Jepang oleh Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis empiris* yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang ada di masyarakat. Metode ini digunakan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan peran Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan rekrutmen program pemagangan ke Jepang. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan *analisis kualitatif*. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen program pemagangan ke Jepang oleh Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan perannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Namun berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen program pemagangan ke Jepang, program pemagangan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lebih tepatnya tidak sesuai dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Peran Seksi Pelatihan dan Pemagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Program Pemagangan ke Jepang

ABSTRACT

High unemployment is still a problem in Central Java. Based on the data on the number of unemployed people, it is certainly a burden on the government to find a solution with various breakthroughs in creating employment opportunities. One of the efforts that can be made to create employment opportunities is to accelerate the improvement of work competencies to fill domestic and abroad employment opportunities, among others, through apprenticeship program to Japan. The aims of the research are first, to find out the role of the Training and Apprenticeship Section of the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province in relation to apprenticeship issues. Second, to find out the implementation of apprenticeship program recruitment to Japan by the Training and Apprenticeship Section of the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province.

The research uses an empirical judicial method, namely legal research concerning the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every legal event that exists in the community. This method is used to examine the legal rules that apply in the community related to the role of the Training and Apprenticeship Section of the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province in the implementation of apprenticeship program recruitment to Japan. The research specification used in this study is descriptive analytical. The method of data collections in this study are literature studies and field studies. In this study, the author uses qualitative analysis. Data that has been obtained is then analyzed using descriptive methods.

The results of this study indicate that the implementation of apprenticeship program recruitment to Japan by the Training and Apprenticeship Section of the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province is not fully in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province has carried out its role well as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER. 08/MEN/V/2008 concerning Procedures for Licensing and Implementation of Apprenticeship, and Regulation of the Central Java Governor Number 64 of 2016 concerning Organization and Work Procedure of Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province. But related to the implementation of apprenticeship program recruitment to Japan, the apprenticeship program is not fully in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, more precisely it is not in accordance with the objectives of manpower development listed in Article 4 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

Keywords: *The Role of the Training and Apprenticeship Section, Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province, Apprenticeship Program to Japan*